



SISTEM PERTAHANAN ISRAEL DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN KEAMANAN NASIONAL

¹Josafath Imanuel, ²Arfin Sudirman, ³Falhan Hakiki

^{1,2}Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang

*Surel: josafath19001@mail.unpad.ac.id

Tanggal pengiriman: 26 November 2023 | Tanggal revisi: 18 Maret 2024 | Tanggal diterima: 25 Maret 2024

ABSTRACT

Israel was founded on May 14, 1948, with a declaration made by David Ben-Gurion. Since its founding, Israel has often faced external threats from other countries, such as Egypt and Jordan. As time goes by, Israel manages to reach peace agreements with its neighboring countries. It turns out that the external threats does not stop. Now, Israel needs to face threats from non-state actors such as Hamas and Hezbollah. Apart from that, developments in international relations have impacted the strategies for achieving national security. This research employs two theories: National Security with three key concepts and Civil-Military Relations with three key concepts. The research utilizes a qualitative method, including literature studies and internet-based research for data collection. This research aims to identify Israel's civil-military relations in facing non-traditional threats to ensure its national security. The results indicate that civil-military relations in Israel, integrated into the democratic system model, have successfully adapted to developments in national security. However, based on the findings of this research, there is no Israeli document in the form of a Defense White Paper serving as a basic constitution for dialogue between the government and the Israel Defense Force (IDF).

Keywords: Non-State Actors, External Threats, Civil-Military Relations, National Security, Non-Traditional Conflict

ABSTRAK

Israel berdiri pada 14 Mei 1948 dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh David Ben-Gurion. Sejak saat itu, Israel kerap kali mendapatkan ancaman eksternal, seperti Mesir dan Yordania. Seiring berjalannya waktu, Israel telah berhasil mencapai perjanjian perdamaian dengan negara-negara tetangganya itu. Akan tetapi, ancaman eksternal yang dihadapi tidak berhenti sampai di situ. Kini, Israel menghadapi ancaman dari Hamas dan Hizbullah sebagai aktor non-negara. Selain itu, perkembangan pada hubungan internasional memberikan dampak akan adanya perubahan strategi untuk mencapai keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu Keamanan Nasional dengan tiga konsep kunci dan Hubungan Sipil-Militer dengan tiga konsep kunci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan riset berbasis internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan sipil-militer Israel dalam menghadapi ancaman non-tradisional untuk menjamin keamanan nasionalnya. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan sipil-militer di Israel, yang termasuk ke dalam model *democratic system*, telah berhasil menyesuaikan dengan perkembangan dari keamanan nasional. Meskipun demikian, berdasarkan temuan penelitian ini, belum ada dokumen Israel yang berbentuk seperti Buku

Putih Pertahanan sebagai konstitusi dasar dari dialog antara pemerintah dengan *Israel Defense Force* (IDF).

Kata Kunci: Aktor Non-Negara, Ancaman Eksternal, Hubungan Sipil-Militer, Keamanan Nasional, Konflik Non-Tradisional

LATAR BELAKANG

14 Mei 1948 menjadi hari di mana Israel resmi berdiri menjadi sebuah negara (Rogachevsky & Zigler, 2022). Hal itu disebabkan karena Kepala *Jewish Agency*, David Ben-Gurion, memproklamasikan berdirinya negara Israel dan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengakui kedaulatan Israel pada hari yang sama. Meskipun Amerika Serikat mendukung Deklarasi Balfour, yang bertujuan untuk mendirikan *national home* bagi orang-orang Yahudi, Franklin D. Roosevelt meyakinkan orang-orang Arab bahwa Amerika Serikat tidak akan turut campur dalam pembentukannya tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu kepada orang Yahudi dan Arab. Pada saat itu, Inggris menolak pendirian Israel di wilayah Palestina karena Inggris masih memegang mandat kolonial di wilayah Palestina sehingga tetap ingin menjaga hubungan baiknya dengan negara-negara Arab di Timur Tengah.

Setelah berdirinya Israel sebagai negara, instrumen terpenting dari negara, yaitu militer, pun dibentuk. Militer Israel dikenal sebagai *Israel Defense Force* (IDF). IDF menjadi struktur birokrasi pertama yang berhasil diubah dari organisasi pra-kemerdekaan yang otonom menjadi lembaga nasional yang berada di bawah kendali pemerintah. Hal tersebut terbukti dari elemen IDF pada masa awal pembentukannya merupakan orang-orang yang berasal dari organisasi militer bawah tanah Yahudi, seperti Irgun dan Lehi. IDF sendiri menjadi pasukan militer yang paling sering terlibat dalam perang pasca Perang Dunia II. Sejak terbentuknya, IDF terlibat dalam delapan perang, yaitu Perang Kemerdekaan (1948-1949), *Sinai Campaign* (1956), *Six-Day War* (1967), *War of Attrition* (1969-1970), Perang Yom Kippur (1973), Perang Lebanon (1982), Perang Teluk (1991), dan Perang Lebanon Kedua (2006) (Freilich, 2015). Setelahnya, IDF terlibat dalam berbagai konflik dengan kekuatan yang kecil. IDF tidak hanya

berhadapan dengan negara-negara Arab di sekitarnya, tetapi juga berhadapan dengan berbagai aktor non-negara, seperti grup-grup teroris yang terorganisasi hingga massa kerusuhan yang tidak terorganisasi.

Pada masa awal terbentuknya Israel, hubungan sipil-militer Israel dirasa kurang menarik perhatian bagi akademisi maupun militer negara lain. Hal ini terlihat dari sebelum tahun 1960-an, belum ada karya ilmiah atau penelitian yang terbit baik pada sisi politik maupun sosiologi tentang hubungan antara masyarakat dan IDF (Cohen, 2008, hal. 7). Padahal, hubungan sipil-militer Israel ini memiliki urgensi yang cukup signifikan. Hal itu disebabkan dari pengambilan keputusan, khususnya kebijakan pertahanan Israel, selalu melibatkan kedua aktor. Hubungan sipil-militer yang dilakukan oleh Israel bukan semata-mata berfungsi untuk keamanan internal Israel sendiri. Hubungan ini berdampak pada negara-negara di sekitarnya yang membuat negara-negara ini pada akhirnya membuat perjanjian perdamaian dengan Israel. Dengan begitu, Israel semakin diakui dan aman posisinya di wilayah Arab.

Sejak berdirinya, Israel menghadapi ancaman-ancaman konflik bersenjata dengan negara-negara tetangganya. Seiring berjalannya waktu, ancaman yang dihadapi oleh Israel semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi akibat arus globalisasi. Meskipun konflik bersenjata dengan negara lain sudah tidak lagi menjadi ancaman yang sangat signifikan untuk Israel, ada ancaman baru dari aktor-aktor non-negara, seperti misalnya terorisme yang hingga saat ini masih meneror Israel. Pemerintah Israel bersama-sama dengan IDF harus mampu menghadapi perubahan ancaman yang ada karena perubahan ancaman ini tidak lagi terhindarkan dengan terglobalisasinya dunia.

Pada 2009, untuk kedua kalinya, Benjamin Netanyahu terpilih menjadi perdana menteri. Kepemimpinan Netanyahu pada masa-masa ini diisi dengan berbagai tantangan baik dari internal maupun eksternal. Dalam pemerintahan Israel, Netanyahu tampil sebagai perdana menteri melalui dukungan koalisi partai. Akan

tetapi, koalisi tersebut terdiri dari partai-partai yang beragam ideologinya. Adapun partai-partai koalisinya yaitu Likud, Yisrael Beiteinu, Buruh, Shas, dan Habayit Hayehudi. Keberagaman ideologi menjadi tantangan Netanyahu dalam melakukan manuver politik. Selain itu, Likud, sebagai partai dari Netanyahu, tergolong ke dalam minoritas untuk koalisinya. Dengan demikian, berbagai kebijakan Netanyahu sejak tahun 2009 ini dipenuhi dengan tawar-menawar baik ke dalam pemerintahan untuk menjaga legitimasi pemerintahannya, maupun ke luar negeri untuk menjamin keamanan nasionalnya.

Peneliti melihat bahwa hubungan sipil-militer sangat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, khususnya keamanan nasional. Hubungan sipil-militer di Israel menjadi unik karena Israel telah berhasil menjamin keamanan nasionalnya selama berpuluh-puluh tahun meskipun telah menghadapi berbagai permasalahan internasional. Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan studi terdahulu dari David Rodman yang berjudul *"Combined Arms Warfare in the Israel Defense Forces: A Historical View"*, penelitian Stuart A. Cohen dengan judul *"The Israel Defense Forces (IDF): From a 'People's Army' to a 'Professional Military' – Cause and Implications"*, penelitian Lazar Berman yang berjudul *"Capturing Contemporary Innovation: Studying IDF Innovation against Hamas and Hizballah"*, penelitian Arye Naor dengan judul *"Civil-Military Relations and Strategic Goal Setting in the Six Day War"*, dan penelitian Yoram Peri dengan judul *"Political-Military Partnership in Israel"*.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana hubungan sipil-militer Israel dalam mencapai keamanan nasional pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu yang kedua?" Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sipil-militer dalam pemerintahan, termasuk di dalamnya pengaruh militer dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintahan Netanyahu sejak 2009. Selain itu, penelitian ini akan

menganalisis juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam faktor-faktor keamanan nasional yang ada di Israel dan cara Pemerintahan Netanyahu merespons hal-hal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan nasional menjadi suatu konsep yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam pandangannya. Perbedaan pandangan ini menyebabkan adanya perbedaan definisi dari keamanan nasional. Definisi yang pertama adalah definisi menurut kaum realisme sehingga keamanan nasional dilihat akan mengutamakan perlindungan perbatasan nasional, aset fisik, dan nilai inti yang dilakukan dengan cara-cara militer (Deudney, 1995). Pemahaman kedua mengacu pada negara-negara yang memiliki lembaga penjamin keamanan dan memprioritaskannya di antara fungsi-fungsi negara yang lain sebagai negara keamanan nasional. Hal ini muncul dengan adanya *National Security Act* di Amerika Serikat pada 1947 serta pembentukan lembaga-lembaganya, seperti *National Security Council* dan *Central Intelligence Agency* yang bertugas untuk mengawasi dan mengupayakan keamanan nasional (Yergin, 1977). Pemahaman yang terakhir adalah pemahaman ke arah institusional. Hal ini mengacu pada institusi politik yang memiliki tanggung jawab atas pelaksana kebijakan keamanan dan disebut sebagai negara keamanan nasional (Ripsman, 2002). Akan tetapi, institusi-institusi ini memiliki variasi yang beragam di berbagai negara. Variasi ini bisa terpengaruh dari hak otonominya, pendanaannya, persenjataan, penyeimbangan internal, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pada pemahaman ini keamanan nasional tidak dapat disamaratakan di seluruh dunia, tetapi lebih dianggap sebagai kategori.

Keamanan nasional pada masa dunia yang terglobalisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan keamanan nasional tradisional. Hal itu dapat terlihat dengan membagi perbedaan ini ke dalam dua tingkatan, yaitu

tingkat global dan tingkat negara. Tingkat global memiliki setidaknya empat perbedaan, antara lain penurunan konflik antarnegara; penurunan pengeluaran pertahanan dunia dan tenaga kerja militer; peningkatan kepentingan institusi multilateral, regional, dan global dalam penyediaan keamanan; dan peningkatan insiden terorisme global. Sedangkan pada tingkat negara, terdapat 10 perubahan yang terjadi pada keamanan nasional karena adanya sistem internasional kontemporer yang mengubah cara negara mengejar keamanan nasionalnya.

Menurut Ripsman dan Paul (2010), terdapat tiga kategori perubahan pada tingkat nasional, yaitu perubahan dalam tantangan yang dihadapi negara, perubahan dalam strategi keamanan nasional yang digunakan negara untuk mengamankan diri mereka sendiri, dan tantangan terhadap eksklusivitas negara sebagai penyedia keamanan nasional. Adapun 10 perubahan itu antara lain pergeseran sifat perang dari perang antarnegara Clausewitzian menjadi “perang jenis ketiga”; pergeseran perancangan keamanan nasional ke arah tantangan perang pasca-industri, khususnya terorisme; keamanan nasional mencakup bidang non-pertahanan seperti perdagangan, ekologi, migrasi, dan kesehatan; doktrin militer nasional yang berubah dari ofensif menjadi defensif; negara memilih *soft balancing* dibanding *traditional hard balancing* untuk menghadapi rivalnya; penurunan wajib militer dan aparat militer; penurunan pengeluaran pertahanan; lembaga militer yang bergeser dari pasukan perang menjadi pasukan polisi; privatisasi keamanan dengan melibatkan aktor non-negara dalam kegiatan pertahanan; dan pengupayaan keamanan melalui lembaga regional.

Selanjutnya, menurut Janowitz, hubungan sipil-militer adalah hubungan antara aktor sipil dan militer dalam masyarakat di masa damai dan perang. Hubungan yang dimaksud mencakup interaksi, peran, serta tanggung jawab dari kedua aktor dalam menjaga keamanan nasional dan nilai-nilai demokrasi. Janowitz melihat bahwa hubungan sipil-militer yang sehat adalah ketika ada keseimbangan kekuatan antara

aktor sipil dan militer dalam masyarakat dengan adanya kontrol sipil atas militer. Dalam *"The Professional Soldier: A Social and Political Portrait"*, Janowitz menjelaskan pentingnya mengembangkan tanggung jawab antara aktor militer dan sipil dengan pernyataan *"the military cannot be a separate caste or social class, it must be integrated into society as a whole."* Dengan demikian, militer digambarkan sebagai institusi yang patuh terhadap negara, bukan menjadi institusi yang otonom (Janowitz, 1964). Hal ini tentunya untuk menekan kemungkinan adanya kudeta yang dilakukan oleh militer. Lebih lanjut, Janowitz berpendapat bahwa *"the military is an instrument of the state, not a state within the state"* yang mengindikasikan bahwa militer ini memang benar-benar sebuah institusi yang tunduk pada pemerintah negara (Janowitz, 1977).

Pada masa-masa ini, gerakan massa memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mengatur pemerintah. Hal itu membuat diktator-diktator militer yang memerintah negara sudah dianggap ketinggalan zaman. Oleh karenanya, untuk menganalisis militer dalam perkembangan politik, khususnya di negara-negara baru, Janowitz (1977) mengklasifikasikan lima model hubungan sipil-militer, antara lain *authoritarian-personal control, authoritarian-mass party, democratic and semi-competitive system, civil-military coalition*, dan *military oligarchy*.

Dengan melihat definisi keamanan nasional dan hubungan sipil-militer ini, peneliti mencoba mengaitkan definisi ini ke dalam penelitian yang peneliti bahas, yaitu model hubungan sipil-militer yang diterapkan oleh Israel dalam mencapai keamanan nasional pada masa dunia yang sudah terglobalisasi. Dalam konteks ini, sipil mengarah pada Pemerintah Israel dan *Israel Police*, sedangkan militer mengarah pada IDF. Untuk keamanan nasionalnya, peneliti akan melihat perubahan-perubahan kebijakan keamanan nasional Israel yang sudah diterapkan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif, menurut Christopher Lamont, adalah sebuah proses pengumpulan data dan analisis data yang menggunakan data non-numerik untuk diolah sebagai makna dan proses yang membentuk politik internasional. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti lebih jauh suatu peristiwa, fenomena, wilayah, negara, organisasi, dan bahkan individu tertentu dengan tujuan menghasilkan berbagai bentuk perangkat beserta sumber daya yang dapat mendukung bahan analisis data berbentuk tulisan (Lamont, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *internet-based research* dan *document-based research*. Pada metode kualitatif, beberapa teknik pengumpulan data perlu dilakukan karena dengan melakukan triangulasi akan sangat berguna untuk mengevaluasi silang temuan peneliti nantinya.

Instrumen dalam penelitian ini adalah hal-hal pendukung yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini, khususnya dalam proses pengumpulan data yaitu dasar hukum, buku, jurnal, dan sebagainya. Peneliti menggunakan dasar-dasar hukum, buku, dokumen, dan jurnal-jurnal penelitian sebagai bahan pendukung untuk menunjang penelitian ini. Selain itu, untuk menguji validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi data dapat membuktikan kebenaran dan keakuratan hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data dengan membandingkan data yang didapatkan dari dasar-dasar hukum, dokumen terkait, beserta laporan berita dari media yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer serta keamanan nasional Israel.

DISKUSI

Pengaruh Militer Terkait Kebijakan Keamanan dan Pertahanan

Sejak tahun 2011, Menteri Keuangan Israel yang menjabat, yaitu Yuval Steinitz, merekomendasikan untuk menurunkan anggaran pertahanan. Akan tetapi, lembaga pertahanan, termasuk IDF, mendesak Netanyahu untuk mempertimbangkan persiapan Israel dalam menghadapi program nuklir Iran. Rekomendasi pemotongan itu disebabkan oleh adanya defisit pada anggaran pemerintah dan para menteri di kabinet melihat bahwa anggaran pertahanan, yang menjadi satu-satunya anggaran paling besar, tidak dapat diabaikan dalam rencana pemotongan anggaran belanja negara (Harel, 2013). Kementerian Pertahanan pada saat itu dipimpin oleh Ehud Barak yang berasal dari Partai Buruh dan merupakan seorang mantan jenderal. Kementerian Pertahanan menjadi aktor penting dalam penolakan pemotongan anggaran pertahanan. Barak, yang dulunya seorang jenderal IDF, melihat bahwa akan ada kesulitan yang akan dihadapi IDF dalam penyesuaian antara pemotongan anggaran dengan penguatan militer untuk menghadapi ancaman. Dengan demikian, Barak menolak adanya pemotongan anggaran pertahanan. Pada akhirnya, sejak awal rencana pemotongan hingga 2013, anggaran pertahanan tidak jadi diturunkan. Hal itu disebabkan oleh 2013 merupakan tahun pemilihan umum dan Netanyahu mempertimbangkan pengaruh Barak sebagai perwakilan dari Partai Buruh untuk mempertahankan koalisi dalam mendukung Netanyahu terpilih kembali sebagai perdana menteri. Harapan tersebut tercapai ketika Barak memutuskan meninggalkan Partai Buruh dan membentuk partai baru, yaitu *Independence*, yang mengikutsertakan sebagian anggota Partai Buruh dan bergabung dalam koalisi Likud untuk pemilihan umum 2013 (Sofer, 2011). Selain itu, anggota IDF memiliki hak suara dalam pemilihan umum sehingga hal itu dijadikan sebagai suatu pertimbangan oleh Pemerintah Israel dalam menerapkan kebijakannya.

Kehadiran dominan lembaga militer dalam wacana-wacana publik membuat lembaga militer memiliki pengaruh dalam kebijakan terkait keamanan nasional. Para perwira IDF sering kali muncul di televisi untuk menjelaskan alasan dan logika di balik operasi militer yang sedang berlangsung. Hal itu membuat masyarakat lebih mempercayai IDF ketimbang para politisi (Fass, 2006). Terlebih, IDF memiliki keahlian militer yang dapat mempengaruhi sikap politik terhadap konflik dan bahkan membentuk kebijakan terkait pertahanan dan keamanan. Politisi di Israel tidak dapat mengabaikan posisi militer karena pengetahuan dari militer menjadi faktor paling berpengaruh dalam pertimbangan eselon politik.

Selain itu, pada tahun 2011, Iran mengklaim bahwa negaranya akan memulai pengembangan bom nuklir. Dengan adanya program demikian, Israel memberikan sanksi atas Iran untuk mencegah Iran melanjutkan programnya. Pada 26 Juni 2011, Netanyahu beserta jajarannya sepakat untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran (Ministry of Foreign Affairs, 2011). Akan tetapi, Netanyahu merasa bahwa sanksi itu tidak akan berhasil mencegah program pengembangan nuklir Iran. Netanyahu pun merancang rencana penyerangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Namun, Menteri Pertahanan Ehud Barak dan Kepala Staf IDF Benny Gantz menolak merealisasikan rencana penyerangan itu. Keduanya melihat bahwa sanksi ekonomi yang telah diberikan kepada Iran dapat berdampak pada dibatalkannya program pengembangan nuklir itu. Dengan tidak adanya dukungan penuh dari Menteri Pertahanan, IDF, dan Mossad, Netanyahu membatalkan rencana penyerangannya itu (New Wires, 2012).

Perubahan Sifat Perang yang Dihadapi oleh Israel

Sejak masa berdirinya Israel, perang sudah menjadi hal yang terikat dengan Israel. Pada masa awal berdirinya, Israel menghadapi perang dengan berbagai negara, seperti Mesir dan Yordania. Perang-perang tersebut melibatkan kekuatan militer skala penuh atau dengan kata lain, perang yang dihadapi bersifat tradisional. IDF menjadi

kekuatan utama Israel dalam menghadapi perang-perang tersebut untuk menjamin keamanan negaranya. Israel telah menghadapi setidaknya delapan perang tradisional, yaitu Perang Kemerdekaan, *Sinai Campaign*, *Six-Day War*, *War of Attrition*, Perang Yom Kippur, Perang Lebanon, Perang Teluk, dan Perang Lebanon Kedua.

Seiring berjalannya waktu, hubungan internasional telah mengalami perkembangan. Salah satunya adalah perkembangan pada ancaman atas konflik. Ancaman-ancaman yang dihadapi oleh negara-negara bukan lagi sebatas ancaman dari negara lain, melainkan juga dari aktor-aktor non-negara. Perkembangan tersebut berdampak juga pada Israel. Israel kini juga harus menghadapi aktor-aktor non-negara dalam menjamin keamanan negaranya. Aktor non-negara yang dihadapi oleh Israel adalah Hizbullah dan Hamas. Kedua aktor tersebut dianggap sebagai organisasi teroris yang dapat mengancam keamanan Israel. Dengan demikian, kini Israel harus memfokuskan kekuatan pertahanannya untuk menghadapi aktor non-negara.

Ancaman yang dihadapi oleh Israel tertuang dalam *IDF Strategy*. *IDF Strategy* merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Staf IDF yang sedang menjabat. Setidaknya sudah ada lima *IDF Strategy*, yaitu di tahun 2002, 2006, 2013, 2015, dan 2018 (Finkel, 2020). Akan tetapi, perubahan ancaman yang dimaksud hanya terdapat pada tiga *IDF Strategy*, yaitu tahun 2002, 2013, dan 2015. *IDF Strategy* pertama dikeluarkan pada tahun 2002, yang di dalamnya tertuang ancaman yang diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu lingkaran dalam, lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga. Lingkaran dalam mengarah kepada keamanan dalam negeri dan Palestina, lingkaran pertama mengarah kepada perbatasan, lingkaran kedua mengarah kepada Irak, dan lingkaran ketiga mengarah kepada Iran dan Libya.

Pada tahun 2013, IDF merancang kembali *IDF Strategy*. Pada *IDF Strategy* 2013, Kepala Staf IDF Benny Gantz merombak beberapa poin *IDF Strategy* sebelumnya. Salah satu perombakannya adalah pada ancaman. Gantz melihat bahwa siber menjadi

sebuah hal baru yang dapat menjadi ancaman bagi Israel. Dengan demikian, *IDF Strategy* 2013 memasukkan ancaman baru, yaitu siber. Perkembangan ancaman ini tidak hanya berhenti ke arah siber. Pada 2015, di bawah kepemimpinan Gadi Eisenkot, IDF kembali merilis *IDF Strategy* terbarunya. *IDF Strategy* 2015 memberikan perombakan dan inovasi dari yang sebelumnya, salah satunya pada ancaman kembali. Ancaman dalam *IDF Strategy* 2015 terbagi dalam tiga jenis, yaitu negara, organisasi *sub-state*, dan organisasi teroris. Dalam *IDF Strategy* 2015, Eisenkot menekankan bahwa kekuatan IDF harus difokuskan untuk menghadapi konflik dengan musuh *sub-state* seperti Hizbullah dan Hamas.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam *IDF Strategy* menjadi bukti nyata bahwa Israel juga mengalami perubahan sifat perang. *IDF Strategy* 2002 berfokus pada negara-negara tetangga untuk menghadapi konflik bersenjata, lalu *IDF Strategy* 2013 memasukkan siber menjadi sebuah ancaman, dan *IDF Strategy* 2015 berfokus pada Hamas dan Hizbullah yang termasuk dalam aktor non-negara. Selain itu, rencana Benjamin Netanyahu yang tertuang dalam *2030 Security Concept* juga menjadi bukti bahwa Israel bersiap untuk menghadapi perkembangan sifat perang. Netanyahu merencanakan untuk memberikan anggaran tambahan untuk meningkatkan kemampuan siber (The 34th Government, 2018).

Pergeseran Strategi Pertahanan Israel Menjadi Defensif

Strategi pertahanan dapat bersifat ofensif dan juga defensif. Pada masa-masa perang dengan negara tetangga, Israel menerapkan strategi ofensif. Hal itu disebabkan oleh sempitnya wilayah Israel yang membuatnya harus melakukan penyerangan terlebih dahulu agar wilayah konflik bukan berada di wilayah Israel karena akan berdampak pada kerusakan Israel. Selain itu, Israel juga terus meningkatkan kekuatan militernya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Peningkatan itu dilakukan salah satunya melalui peningkatan jumlah anggota militer.

IDF sebagai badan militer yang menjadi kekuatan tempur utama dibantu oleh pasukan wajib militer. Wajib militer di Israel menjadi salah satu kekuatan utama karena melibatkan seluruh penduduk Israel. Sifat dari strategi pertahanan Israel dapat terlihat dari tiga hal, yaitu doktrin militer, jumlah pasukan, dan anggaran pertahanan.

Doktrin militer IDF tertuang dalam *IDF Strategy*. *IDF Strategy* 2015 menunjukkan dengan jelas bahwa strategi IDF bersifat defensif. Hal itu terlihat dari tujuan yang tertuang di dalamnya, yang menyatakan bahwa IDF akan berfokus pada penjagaan eksistensi, pelestarian nilai-nilai Israel, pengamanan kekuatan sosial dan ekonomi, serta memperkuat status internasional dan regional (IDF Strategy, 2015, hal. 9). Tujuan yang tertuang tidak menunjukkan bahwa Israel akan berencana untuk melakukan ekspansi atau konflik militer dengan negara lain. Israel akan memfokuskan pada keamanan internalnya dengan memperkuat pertahanannya. Selain itu, dalam *IDF Strategy* 2015 juga dinyatakan bahwa prinsip yang paling pertama dari IDF adalah strategi defensif. Strategi defensif yang dimaksudkan dalam *IDF Strategy* adalah IDF akan berusaha untuk menciptakan kondisi *deterrence* (IDF Strategy, 2015, hal. 17-30). Meskipun dalam prinsipnya tertuang konsep militer ofensif, hal itu hanya akan dilakukan jika musuh tidak dapat dihadapi dengan pertahanan. Dengan kata lain, IDF akan berada pada posisi defensif jika musuhnya tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu.

Pada masa-masa perang awal pendirian Israel, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Israel menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan jumlah pasukan. Perang Kemerdekaan menampilkan infanteri sebagai korps paling berkontribusi dalam kemenangannya. Dengan kontribusinya itu, Israel meningkatkan jumlah pasukan infanteri sebagai pasukan dominan dari IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Israel usai Israel memenangkan *Six Day War* tahun 1967. Keberhasilan pasukan lapis baja membuat pemerintah memfokuskan untuk meningkatkan pasukan ini pada tahun-tahun selanjutnya. Hal itu terjadi terus-menerus sehingga jumlah

pasukan IDF selalu mengalami peningkatan. Hal itu dilakukan untuk membuat kondisi militer Israel siap menghadapi perang-perang yang akan datang.

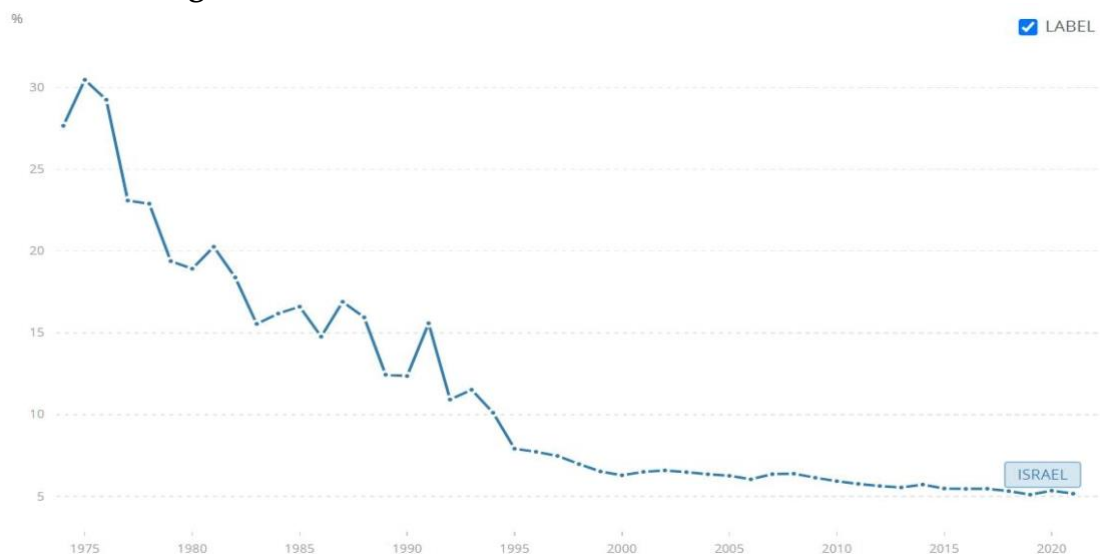
Penurunan jumlah pasukan IDF dimulai pada saat Perang Lebanon tahun 1982. Israel melihat bahwa serangan darat secara besar-besaran tidak akan efektif dalam menghadapi Lebanon karena Hizbullah menggunakan taktik gerilya. Dengan demikian, Israel menggunakan kekuatan artileri dan udaranya untuk mengusir penduduk Lebanon dari rumah dengan harapan penduduk itu mendesak Pemerintah Lebanon untuk menahan Hizbullah melakukan penyerangan (Shimshi, 1995). Hal itu berjalan terus selama konflik-konflik ke depannya dalam menghadapi Hamas dan Hizbullah. Israel tidak pernah melakukan kampanye militer darat besar-besaran seperti yang mereka lakukan kepada Mesir dan Suriah. Pemerintah Israel tidak ingin mempertaruhkan kerugian yang besar untuk kemenangan melawan organisasi sub-negara sehingga IDF hanya melancarkan serangan-serangan menggunakan artileri dan serangan udara untuk memukul mundur pasukan Hizbullah dan Hamas. Meskipun IDF pernah menggunakan kekuatan daratnya, hal itu hanya dilakukan dalam skala terbatas untuk meminimalisasi kerugian Israel. Dengan bergantinya strategi ofensif Israel dengan mengandalkan persenjataan, maka pasukan yang diperlukan menurun untuk menekan anggaran pertahanan.

Selain itu, terdapat faktor lain dalam penurunan jumlah pasukan IDF. Salah satu komposisi IDF adalah wajib militer. Pada tahun 2014, melalui amandemen *Security Service Law* 1986, terjadi pengurangan masa layanan wajib militer. Sebelum amandemen ini, masa layanan untuk usia 18-26 tahun adalah 36 bulan, masa layanan untuk usia 27-29 tahun adalah 32 bulan, dan masa layanan untuk perempuan adalah 28 bulan (Security Service Law 1986). Berdasarkan Amandemen Nomor 19 tahun 2014, masa layanan untuk usia 18-26 tahun adalah 32 bulan, masa layanan untuk usia 27-29 tahun 26 bulan, dan masa layanan untuk perempuan adalah 24 bulan. Pengurangan

masa layanan ini tentu berdampak pada jumlah pasukan IDF, khususnya dari komponen wajib militer.

Anggaran pertahanan Israel pada masa awal berdirinya menjadi salah satu fokus utama dari anggaran negaranya. Dasar dari fokusnya anggaran pertahanan adalah karena Israel harus bersiap menghadapi serangan dari negara-negara tetangga untuk konflik tradisional. Anggaran pertahanan Israel pada masa awal ini ditujukan untuk penguatan IDF baik dari jumlah pasukan maupun persenjataan yang dimiliki. Kedua hal itu menjadi indikator utama dari kekuatan tempur Israel dalam menghadapi konflik tradisional.

Grafik 1.
Pengeluaran Militer Israel (Berdasarkan Persentase PDB)



Sumber: (World Bank, 2022)

Pada masa-masa konflik tradisional, anggaran pertahanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 30,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Israel. Hal itu terjadi pada tahun 1975 usai Israel menghadapi Suriah, Libya, dan Mesir dalam Perang Yom Kippur. Pada saat Perang Yom Kippur, Israel diserang secara mendadak dan teknologi tempur milik IDF kurang mampu

memberikan perlawanan secara langsung terhadap serangan tersebut. Oleh karenanya, anggaran pertahanan Israel mencapai kenaikan yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan tempur IDF baik dari pasukan maupun teknologi-teknologinya. Israel juga melakukan upaya swasembada persenjataan yang memakan anggaran yang cukup besar.

Meskipun anggaran pertahanan Israel mencapai titik tertinggi pada angka 30,5% dari PDB, tahun 1980-an menjadi awal mula penurunan yang cukup signifikan dari anggaran pertahanan Israel. Pada tahun 1980-an, penurunan terjadi karena adanya bantuan militer dari Amerika Serikat sebagai hibah. Dengan kata lain, Israel tidak perlu mengeluarkan anggaran pertahanan yang berlebihan untuk pengadaan peralatan tempur karena sudah mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Penurunan anggaran pertahanan juga didorong oleh menurunnya ancaman dari negara-negara tetangga. Pasca tahun 1994, ketika Israel sukses menyepakati perjanjian perdamaian dengan Mesir dan Yordania, anggaran pertahanan Israel terus menurun. Pada tahun 1995, anggaran pertahanan Israel menurun hingga 7,9% dari PDB. Penurunan itu juga terus berlanjut hingga pada tahun 2021, anggaran pertahanan Israel berada di angka 5,2% dari PDB.

Penurunan Eksklusivitas Israel sebagai Penjamin Keamanan Nasional

Ripsman melihat bahwa penurunan eksklusivitas negara dicirikan dengan adanya pergeseran militer menjadi kekuatan kepolisian dan adanya privatisasi keamanan. Kekuatan *constabulary* yang ada di Israel ditunjukkan dengan adanya kolaborasi antara IDF dan *Israel Police* dalam menjalankan sistem pertahanan dan keamanan Israel. Privatisasi keamanan di Israel dapat dilihat dari adanya keterlibatan perusahaan swasta dalam urusan pertahanan dan keamanan untuk membantu IDF dan *Israel Police*.

Meskipun Israel tidak memiliki pasukan khusus sebagai *constabulary* seperti Amerika Serikat, khususnya di Texas, Israel memenuhi tugas dan tanggung jawab pasukan *constabulary* melalui kolaborasi IDF dan *Israel Police*. Kolaborasi antarkedua aktor ini terlihat di daerah-daerah perbatasan. Berdasarkan *Security Service Law* 1986, pasukan IDF memiliki peluang untuk ditugaskan sebagai polisi perbatasan. Hal itu diatur dalam Pasal 24 *Security Service Law* 1986 yang menyatakan bahwa pasukan IDF dimungkinkan untuk ditugaskan menjadi Penjaga Perbatasan *Israel Police*. Selanjutnya, anggota IDF yang ditugaskan ini akan bertanggung jawab kepada Inspektur *Israel Police*, bukan kepada Kepala Staf IDF selama masa tugasnya. Lebih lanjut, Pasal 24a menyatakan bahwa anggota IDF dapat ditugaskan pada *Israel Police* selain sebagai penjaga perbatasan dengan syarat tugas dan fungsi jabatannya masih terkait keamanan negara dan penduduk. Dengan adanya undang-undang seperti itu, IDF dan *Israel Police* akan bekerja sama secara tidak langsung di wilayah-wilayah perbatasan.

Untuk otoritas-otoritas di perbatasan, hampir seluruh otoritas berada di bawah *Israel Police* melalui Polisi Perbatasan. Polisi Perbatasan memiliki otoritas di enam distrik, yaitu *Northern District*, *Coastal District*, *Central District*, *Jerusalem District*, *Judea and Samaria District*, dan *Southern District*. Meskipun Polisi Perbatasan berada di bawah kendali *Israel Police*, dalam keadaan darurat, unit ini akan berada di bawah komando IDF. Untuk wilayah-wilayah *occupied Palestinian territory* (oPt), *Israel Police* dan IDF masih terlibat dalam otoritasnya. IDF memiliki tanggung jawab untuk ranah militer seperti *military checkpoint* yang berada di wilayah Tepi Barat dan untuk ranah keamanan akan berada di bawah kendali *Israel Police*.

Selain kolaborasi antara IDF dan *Israel Police* sebagai kekuatan kepolisian, perbatasan Israel juga diperkuat dengan bantuan dari perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini berbentuk *Private Military and Security Companies* (PMSCs) atau *private investigator* dan *security service* menurut definisi Pemerintah Israel. Kerangka hukum

yang mengatur PMSCs di Israel tertuang dalam *The Law on Private Investigators and Security Services* 1972. Undang-undang ini mengatur pendirian dan pengoperasian hingga kerangka kerja umum PMSCs. PMSCs yang dikontrak oleh pemerintah ditugaskan untuk membantu di pos-pos pemeriksaan, zona industri, dan kawasan pemukiman. PMSCs pada bidang keamanan terbagi dalam tiga wilayah, yaitu Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Tiap-tiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda sehingga membuat PMSCs yang dikontrak juga berbeda-beda sesuai keperluannya.

Pasukan keamanan swasta di Israel memiliki keunikan dibanding negara-negara lain. Keunikan itu adalah pasukan keamanan swasta diberikan perlengkapan senjata IDF serta menjalani pelatihan militer seperti anggota IDF. Selain itu, wewenang pasukan PMSCs setara dengan kepolisian. Dengan kata lain, PMSCs di Israel memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan, penahanan, dan menggunakan tindakan kekerasan jika diperlukan (Hareuveni, 2014). Kewenangan PMSCs ini berdasarkan dasar hukum yang tertuang dalam *The Powers for Maintaining Public Security Law* 2005. Akan tetapi, ada pengecualian untuk kewenangan *body search*, di mana PMSCs membutuhkan pengawasan dari otoritas yang bertanggung jawab baik IDF maupun *Israel Police*.

Privatisasi yang ada di Tepi Barat terdiri atas lima bagian, yaitu pos pemeriksaan, wilayah industri dan pemukiman, *The Wall*, penjara, dan layanan pengawalan. Memasuki tahun 2003, Israel mencoba melakukan *outsourcing* untuk mencari penanggung jawab pos pemeriksaan dan baru berhasil pada tahun 2006 yang ditunjukkan di pos pemeriksaan Sha'ar Efraim dan Erez. Privatisasi oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan pos perbatasan ini sebagai pos perbatasan berstandar internasional seperti yang ada di berbagai negara lain serta untuk melakukan demiliterisasi dan sipilisasi. Pada awal dibukanya privatisasi ini, lima perusahaan terpilih untuk membantu negara mengontrol pos pemeriksaan. Lima perusahaan itu

adalah Mikud Security, Ari Avtaha, S. B. Security, Modi'in Ezrachi, dan Sheleg Lavan. Akan tetapi, saat pemerintah membuka tender kembali untuk proyek pos pemeriksaan ini pada tahun 2008, hanya menyisakan dua perusahaan, yaitu Modi'in Ezrachi dan Sheleg Lavan.

Untuk kawasan industri dan pemukiman, PMSCs memainkan peran dalam menjaga gerbang pemukiman dan tempat usaha swasta serta pos-pos pengawasan di pintu masuk kawasan industri. Terdapat lima perusahaan yang dikontrak untuk membantu kawasan industri dan pemukiman, yaitu Avidar Security Services, Maavarim Civil Engineering, Yahav Oranit, Modi'in Ezrachi, dan G4S Israel. Bagian Tepi Barat selanjutnya adalah *The Wall* yang bertugas untuk menyediakan peralatan keamanan seperti pagar, sistem radar, dan sistem pengawasan elektronik serta menyediakan pasukan keamanan pada konstruksi *The Wall*. Ada delapan PMSCs yang dilibatkan di sana, yaitu Momentum S. O. S., Netz 2 Bitachon, Ari Avtaha, S. B. Security Systems, Modi'in Ezrachi, G4S Israel, Mikud Security, dan Sheleg Lavan. Sedangkan untuk penjara, tugas dari PMSCs hanya sebatas menyediakan infrastruktur penjara. PMSCs yang terlibat hanya dua, yaitu G4S Israel, yang menyediakan sistem keamanan dan membangun ruang komando pusat untuk mengontrol seluruh fasilitas yang ada, dan Africa Israel Investments, yang bertugas untuk membangun penjara Beersheba.

Privatisasi di Yerusalem Timur meliputi tiga bagian, yaitu pos pemeriksaan, kawasan pemukiman, dan *Jerusalem Light Rail Train* (JLRT). Pos pemeriksaan di Yerusalem Timur tercipta sebagai implementasi *Israel Separation Project*. Pemerintah Israel memprivatisasi pos pemeriksaan Yerusalem Timur dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan. PMSCs yang dikontrak oleh Israel di bagian ini hanya satu, yaitu Modi'in Ezrachi. Untuk kawasan pemukiman, privatisasi dilakukan dalam berbagai aktivitas seperti pengelolaan *City of David* serta pengamanan rumah-rumah menteri dan rumah-rumah orang Yahudi di Yerusalem Timur. Pengamanan yang

dimaksud di sini dapat berbentuk pengawalan bersenjata, pemeriksaan identitas ketika memasuki wilayah pemukiman, dan pengoperasian kamera pengintai. Untuk PMSCs yang dikontrak oleh pemerintah di JLRT sebanyak dua perusahaan, yaitu Modi'in Ezrachi dan Illit Security. PMSCs di JLRT bertugas untuk menjamin keamanan di kereta maupun di stasiun. Dasar hukum yang melatari pelibatan PMSCs di JLRT adalah *Law for the Regulation of Security in Public Bodies* 1998. Adapun Pemerintah Israel mempercayakan tugas ini pada Modi'in Ezrachi.

Privatisasi yang terakhir terjadi di Jalur Gaza, yang menjadi wilayah pendudukan militer Israel sejak tahun 1967 setelah lepas dari militer Mesir. Pada 2005, Israel menyatakan berakhirnya pendudukan militer di wilayah Jalur Gaza seiring adanya *Gaza Disengagement Plan*. Pada tahun 2007, Hamas, sebagai organisasi yang memenangkan pemilihan umum untuk Otoritas Palestina, secara paksa mengambil alih administrasi di wilayah Jalur Gaza. Meskipun administrasi wilayah ini berada di bawah Palestina, Israel tetap memegang kendali atas wilayah itu dan mengatur perdagangan di wilayah tersebut. PMSCs di wilayah ini dapat diamati dari tahun 2005 ketika Israel mengimplementasikan *Gaza Disengagement Plan*. Terdapat tiga jenis PMSCs yang beroperasi pada masa itu, yaitu PMSCs yang bergerak dalam pengamanan truk komoditas yang masuk ke Israel dari Gaza, PMSCs yang bergerak dalam perlindungan warga negara asing yang berkunjung ke Gaza, dan PMSCs yang bergerak dalam pengoperasian pos-pos pemeriksaan yang masuk dan keluar wilayah Gaza. Adapun PMSCs yang dikontrak oleh Pemerintah Israel adalah Sheleg Lavan dan White Snow Company.

Perkembangan Israel terhadap Geopolitik Timur Tengah

Perkembangan-perkembangan geopolitik di Timur Tengah membuat Israel memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut untuk menjamin keamanan nasionalnya. Pengaruh itu tentu berdampak bagi negara-negara di Timur Tengah. Hal

tersebut dapat dilihat dengan adanya penerimaan negara-negara Teluk terhadap Israel sebagai sebuah negara di kawasan (Chulov & Safi, 2020). Oman menjadi salah satu negara yang telah menerima keberadaan Israel di Timur Tengah. Pada tahun 2018, Netanyahu berkunjung ke Oman untuk menemui Sultan Qaboos. Kunjungan ini menjadi kunjungan resmi pertama Israel ke Oman sejak 22 tahun. Pasca kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Oman Yousuf bin Alawi bin Abdullah mengatakan bahwa Israel menjadi sebuah negara yang hadir di kawasan dan kenyataan itu harus diterima sehingga seluruh isu mengenai Timur Tengah perlu melibatkan Israel di dalamnya (Middle East Eye, 2018). Hal tersebut disebabkan pandangan Oman bahwa Israel memainkan peran penting dalam isu-isu regional. Penerimaan tersebut juga dapat dilihat dari tindakan Uni Emirat Arab (UEA) yang membuka kantor perwakilan Israel untuk IRENA di Abu Dhabi serta adanya delegasi Arab Saudi yang untuk pertama kalinya berkunjung ke Israel untuk bertukar pandangan mengenai masalah yang menjadi kepentingan kedua belah pihak (Reuters, 2015; Pileggi, 2016). Kemampuan Israel dalam menjamin keamanan nasionalnya secara internal berdampak juga terhadap sikap negara-negara di kawasan. Dengan adanya dukungan dari negara-negara di kawasan, maka ancaman yang perlu dihadapi oleh Israel akan menurun. Dengan demikian, keamanan nasionalnya dapat semakin terjamin.

KESIMPULAN

Israel telah menghadapi berbagai ancaman sejak pendiriannya. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, kolaborasi antara Pemerintah Israel, sebagai pembuat kebijakan, dan IDF, sebagai kekuatan pertahanan, berkontribusi sangat besar dalam kesuksesan-kesuksesan pada konflik-konflik terdahulu. Pemerintah Israel dijalankan oleh sipil karena terpilih melalui sistem yang demokratis, yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum di Israel juga melibatkan berbagai macam partai politik yang saling bersaing. Selanjutnya, IDF dinyatakan dalam *Basic Law: The Military* sebagai

kekuatan pertahanan Israel dan tunduk pada Pemerintah Israel melalui Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, hubungan sipil-militer Israel termasuk dalam model *democratic system* menurut Janowitz.

Globalisasi yang terjadi di dunia membawa perubahan dalam hubungan internasional. Salah satunya adalah perkembangan keamanan nasional. Perkembangan keamanan nasional membuat negara harus menghadapi ancaman baru dari aktor-aktor non-negara. Negara juga harus menerapkan strategi pertahanan yang bersifat defensif. Selain itu, ada kecenderungan penurunan eksklusivitas negara sebagai penjamin keamanan nasional akibat semakin luasnya ancaman yang perlu dihadapi oleh negara.

Kini, Israel berhadapan dengan aktor-aktor non-negara, yaitu Hamas dan Hizbullah. Israel juga telah menyatakan bahwa kedua aktor itu adalah ancaman bagi stabilitas negaranya. Hal itu tertuang dalam *IDF Strategy 2015* yang menyatakan bahwa fokus dari IDF adalah untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari Hamas dan Hizbullah. Strategi pertahanan Israel juga tertuang dalam *IDF Strategy 2015*. Di dalamnya, Israel menyatakan bahwa IDF akan menerapkan strategi yang bersifat defensif. Hal itu disebabkan oleh pandangan Israel bahwa keuntungan dari investasi ekonomi lebih menguntungkan daripada penaklukan wilayah. *IDF Strategy 2015* juga mencakup fokus penggunaan kekuatan IDF. Pada langkah yang paling pertama, IDF akan menggunakan kekuatannya untuk mencegah konflik dan menciptakan kondisi *deterrence*. Selain itu, amandemen *Security Service Law 1986* pada tahun 2015 membuat masa layanan wajib militer berkurang sehingga tentunya akan berdampak juga pada penurunan jumlah pasukan IDF dan anggaran pertahanan Israel. Lalu, eksklusivitas Israel sebagai penjamin keamanan nasional terlihat dari adanya pergeseran tugas IDF ke dalam kekuatan kepolisian dan privatisasi keamanan. Pergeseran tugas IDF terlihat dalam Pasal 24 amandemen *Security Service Law 1986* yang menyatakan bahwa anggota IDF dapat ditugaskan sebagai polisi perbatasan

yang berada di bawah perintah Inspektur *Israel Police*. Selain bertugas dalam polisi perbatasan, anggota IDF juga dapat ditempatkan di penjara-penjara. Sedangkan privatisasi keamanan di Israel terlihat dengan adanya keterlibatan PMSCs dalam urusan keamanan. Keterlibatan PMSCs setidaknya dapat dilihat di tiga wilayah, yaitu Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. PMSCs ini membantu IDF dan *Israel Police* dalam pengelolaan infrastruktur di pos-pos pemeriksaan, wilayah pemukiman, dan fasilitas-fasilitas keamanan lainnya. Selain menjadi pengelola, PMSCs juga hadir untuk membantu IDF dan *Israel Police* dengan mengirimkan pasukan-pasukan keamanan di tiap-tiap wilayah untuk menjamin keamanannya.

Fokus IDF kepada Hamas dan Hizbullah menunjukkan bahwa Israel telah bersiap untuk menghadapi perubahan sifat perang melalui adanya ancaman aktor non-negara. Selanjutnya, strategi keamanan nasional Israel yang defensif, penurunan jumlah pasukan, dan penurunan anggaran pertahanan menunjukkan pergeseran strategi pertahanan menjadi defensif. Terakhir, kolaborasi antara IDF bersama *Israel Police* serta privatisasi keamanan di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza menunjukkan penurunan eksklusivitas negara. Dengan hal-hal tersebut, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Israel sudah sejalan dengan perkembangan keamanan nasional sehingga dapat dikatakan bahwa Israel sudah bisa menjamin keamanan nasionalnya.

BIBLIOGRAFI

- Chulov, M., & Safi, M. (2020, April 28). Ramadan TV dramas signal shift in Arab-Israeli relations. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/ramadan-tv-dramas-signal-shift-in-arab-israeli-relations>
- Cohen, S. A. (2008). *Israel and its Army: From cohesion to confusion*. New York: Routledge.
- Deudney, D. (1995). Nuclear Weapons and the Waning of the Real-State. *Daedalus*, 124(2), 209-231.

-
- Eizenkot, G. (2015, Juli). *IDF Strategy*. Diambil kembali dari The Institute for National Security Studies: <https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/IDF-Strategy.pdf>
- Finkel, M. (2020, November 24). *IDF Strategy Documents, 2002-2018: On Processes, Chiefs of Staff, and the IDF*. Diambil kembali dari IDF: <https://www.idf.il/en/minisites/dado-center/research/idf-strategy-documents-2002-2018-on-processes-chiefs-of-staff-and-the-idf/>
- Freilich, C. D. (2015). Why Can't Israel Win Wars Any More? *Survival*, 57(2), 79-92.
- Hareuveni, E. (2014). *The Lawless Zone*. Tel Aviv: Yesh Din.
- Janowitz, M. (1964). *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: The Free Press.
- Janowitz, M. (1977). *Military Institutions and Coercion in the Developing Nations*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Knesset. (1986, Januari 30). Security Service Law 1986. Diambil kembali dari Government of Israel: https://www.gov.il/BlobFolder/service/registration_and_regulation_of_idf_status/en/ServiceRecognizedNationalTargets_1.pdf
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Middle East Eye. (2018, Oktober 29). Oman says it is time to accept Israel in region and 'move to a new world'. Diambil kembali dari Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/news/oman-says-it-time-accept-israel-region-and-move-new-world>
- Pileggi, T. (2016, Juli 24). In Israel, ex-Saudi general says Palestinian state would curb Iran aggression. Diambil kembali dari The Times of Israel: <https://www.timesofisrael.com/in-israel-ex-saudi-general-says-palestinian-state-would-curb-iran-aggression/>
- Reuters. (2015, November 28). Israel to open representative office in Abu Dhabi, first in UAE. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/idUSL8N13M30X/>
- Ripsman, N. M. (2002). *Peacemaking by Democracies: The Effect of State Autonomy on the Post-World-War Settlements*. Pennsylvania: Penn State University Press.
- Ripsman, N. M., & Paul, T. V. (2010). *Globalization and the National Security State*. New York: Oxford University Press.
- Rogachevsky, N., & Zigler, D. (2022). *Israel's Declaration of Independence: The History and Political Theory of the Nation's Founding Moment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shimshi, E. (1995). *By Virtue of Stratagem*. Ministry of Defence.

-
- The 34th Government. (2018, Agustus 15). *PM Netanyahu Presents "2030 Security Concept" to the Cabinet*. Diambil kembali dari Israel Government: https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_security150818
- World Bank. (2022). *Military expenditure (% of GDP)*. Diambil kembali dari The World Bank: <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS>
- Yergin, D. (1977). *Shattered Peace*. Boston: Houghton Mifflin.